

## SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN DESA KAJULANGKO KECAMATAN AMPANA TETE KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Jafar Arb. Jasa<sup>1</sup>, Syukur Umar<sup>2</sup>, Hendra Pribadi<sup>2</sup>, Anwar<sup>2</sup>

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Email: Jafararbjas@gmail.com

<sup>2</sup>Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

### Abstract

*Community forest is basically a state forest, managed by the society through a rural administrative organization, and used for the welfare of the villager. Village forest management can be seen from the distribution arrangements of managed land to any farmer. Village ordinances are regulated that each village of farmers are only allowed to manage the maximum forest land of 0.5 hectares for farmers based on historical background who managed more than 0.5 hectares before being designated as community forest. The forest of Kajulangko is located in the village of villages covering the sub-district of Tojo Una-Una. Where the population of the Kajulangko village was 1129, the number of family heads at the time of the formation of the Kajulangko village was 278 family heads. The village area of Kajulangko is approximately 12 square kilometers. To understand the attitude of society can be analyzed using descriptive methods he or she USES a scale of 1-2-3-4-5. Studies have shown that people's attitude toward community forest is good for the society being high (119), good community forest for the village government is likely to be moderate (62), village forest is important for the moderate economic welfare (57) and village forests are essential for forest sustainability to be very high (135).*

**Keywords:** *Community forest, management, community attitude*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya dan yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Hutan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, hutan merupakan tempat tinggal dan sebagai tempat untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Pemanfaatan hutan dan hasil hutan merupakan mata pencaharian sebagai tambahan bagi masyarakat. Apabila pemanfaatan tersebut untuk tujuan komersial, mencari keuntungan misalnya untuk di perdagangkan diluar komunitas atau negeri maka akan dikenakan bungo. Bungo adalah semacam pajak yang diperlakukan atas pemanfaatan sumber daya alam negeri yang bertujuan dengan mencari keuntungan dan untuk kepentingan komersial (Hamzah, 2015).

Hutan desa pada dasarnya adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administrasi pedesaan dan dimanfaatkan

untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hutan desa di maksud memberikan akses masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumber daya Hutan secara lestari dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Santoso, 2018).

Pengelolaan Hutan Desa dapat dilihat dari pengaturan distribusi lahan kelola kepada setiap petani. Didalam peraturan desa telah diatur bahwa setiap desa rumah tangga petani hanya di izinkan untuk mengelola lahan Hutan Desa maksimal 0,5 hektar bagi petani yang berdasarkan latar belakang sejarah telah mengelola lahan lebih dari 0,5 hektar sebelum di tetapkan sebagai Hutan Desa, dapat diberikan dispensasi untuk melanjutkan pengelolaan lahan tersebut dengan ketentuan bahwa didalam areal tersebut terdapat tanaman tahunan berumur minimal 4 tahun, bukan tanaman yang ditanam setelah kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai areal keja Hutan Desa (Sahide, 2013)

Pengelolaan Hutan Desa diperlukan perencanaan yang tepat agar kelestarian Hutan Desa tetap terjaga, selain itu pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan lembaga yang

ikut serta, berperan penting sebagai pengambil keputusan, setelah rencana pada pengelolaan hutan sudah direncanakan dengan baik. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penyuluhan dan monitoring kepada masyarakat sehingga dalam pengelolaan hutan desa dapat menerapkan teknik-teknik atau sistem pengelolaan yang baik. Bertolak dari hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana persepsi sikap masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Desa, serta bentuk pemanfaatan sumber alam yang disekitar hutan.

Aspek legalitas juga terjadi pada pengelolaan Hutan Desa di tempat lain seperti disampaikan penelitian terdahulu oleh Wahid (2010) bahwa tujuan pembangunan Hutan Desa adalah mewujudkan pengelolaan hutan oleh masyarakat dan peningkatan produktifitas lahan dusun dengan strategi yaitu 1) pemberian legalitas hak kelolah hutan pada masyarakat sesuai dengan kebijakan berundang-undang yang ada 2) penatan area hutan dan perumusan bentuk dalam pengelolaan hutan. Ketiga, aspek ekonomi berupa keterbatasan dana pendampingan dan modal. Penelitian menunjukkan bahwa aspek ekonomi yang menjadi penghambat perencanaan hutan yang diperoleh dari hasil wawancara adalah keterbatasan modal untuk pengelolaan hutan. Paradigm dalam pemberdayaan pemberdayaan masyarakat saat ini masi didominasi persepsi bahwa ekonomi berupa keterbatasan dana pendampingan dan modal. Penelitian menunjukkan bahwa aspek ekonomi yang menjadi penghambat perencanaan hutan yang diperoleh dari hasil wawancara adalah keterbatasan modal untuk pengelolaan hutan. Paradigma dalam pemberdayaan pemberdayaan masyarakat saat ini masi didominasi persepsi bahwa peninglatan tarif hidup masyarakat dengan cara memberikan sejumlah dana sebagai modal. Padahal pendekatan tersebut tidak selalu tepat, karena masyarakat belum tentu memerlukan dana. Ada pula masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi tidak mengakses pasar, jadi permasalahan memberdayakan masyarakat tidak dapat disamakan, harus dilihat kasus per kasus dan kondisi negaranya (Suryadiuwarti dkk., 2015)

Sikap adalah mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan akal ikut menentukan kecenderungan perilaku individu terhadap manusia

lain atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu. Pembentukan sikap tidak terjadi sendirinya atau begitu saja, pembentukan selalu berhubungan dengan interaksi sosial baik yang terjadi didalam maupun diluar kelompok baik secara alami ataupun bantuan teknologi informasi (Lisma dkk., 2017).

Perilaku merupakan hasil kegiatan atau aktifitas organisai. Perilaku terbentuk dari hasil adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku manusia merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Eperti berjalan, berbicara, bereaksi, cara berpakaian, tradisi dan lain sebagainya. Perilaku adalah segala kegiatan yang dilakukan organisme baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung (Fitrianiy dkk., 2018).

Hutan Desa Kajulangko Terletak di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, jumlah penduduk pada saat pembentukan desa kajulangko berjumlah 1.129 jiwa, jumlah kepala keluarga pada saat pembentukan desa kajulangko berjumlah 278 KK, luas wilayah desa Kajulangko ±12 kilometer persegi dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pusungi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Uebone, Sebelah Selatan selatan berbatasan dengan Hutan Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Toba.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap pengelolaan HD di Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Desa di Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini untuk sebagai referensi-referensi bagi istansi terkait dan juga untuk sebagai pengetahuan mahasiswa yang akan melakukan penelitian serta sebagai pengetahuan dan acuan untukmasyarakat .

## METODE PENELITIAN

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari bulan November sampai dengan Desember 2019 yang bertempat di Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

### Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu panduan pertanyaan berupa kuisisioner saat wawancara penelitian nanti. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera sebagai alat dokumentasi kegiatan penelitian selama di lapangan, alat tulis menulis dan buku digunakan sebagai alat untuk mencatat hal-hal yang penting dalam proses penelitian.

### Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara terhadap masyarakat berdasarkan pedoman yang telah disiapkan (Kuisisioner). Data ini meliputi informasi tentang tingkat pendidikan, umur dan mata pencaharian sebagai faktor responden masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Desa

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang diambil adalah data yang di perlukan sebagai penunjang dalam penelitian ini yaitu keadaan umum lokasi yang meliputi keadaan fisik lokasi penelitian serta data penunjang diperoleh dari sumber yang terkait yakni instansi- instansi yang berkaitan dengan penelitian yaitu data sosial yang di masyarakat serta beberapa literatur.

### Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengambilan informasi dengan metode survei atau langsung di lapangan, serta wawancara langsung kepada masyarakat baik sekelompok maupun individu dengan beberapa responden yang terdiri dari tokoh masyarakat dan aparat desa dalam melakukan wawancara penentuan responden dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu dilakukan dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih oleh Peneliti

Responden merupakan masyarakat setempat (Penduduk asli dan pendatang). Menurut data BTA Kabupaten Tojo Una-Una jumlah kepala keluarga di Desa Kajulangko sebanyak 278 KK, sedangkan responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden (10%).

### Analisis Data

Untuk mengetahui sikap masyarakat dapat dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif dengan dilakukannya skala 1-2-3-4-5. Untuk menentukan skala pada metode ini, setiap responden akan diminta jawabannya atas pertanyaan yang telah dibuat peneliti dalam bentuk kuisisioner. Adapun kategori jawaban yang telah disiapkan terdapat pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Scoring Untuk Kategori Jawaban Responden Terpilih

No	Pernyataan	Skor	Jumlah Responden	Nilai Skor x Jum. Responden
1.	Tidak Menyikapi	1		
2.	Kurang Menyikapi	2		
3.	Cukup Menyikapi	3		
4.	Menyikapi	4		
5.	Sangat Menyikapi	5		

Dengan demikian untuk mengetahui seberapa besar sikap masyarakat terhadap pengelolaan hutan Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una dapat ditentukan pada table 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Tinggi dan Rendah

No	Kategori Peran	Nilai Skor x Jum. Responden	Range Skor
1.	Rendah		30-53
2.	Sedang		54-77
3.	Cukup Tinggi		78-101

4.	Tinggi	102-125
5.	Sangat Tinggi	126-150

Dari hasil data yang diperoleh dengan metode tersebut diatas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir mengenai sikap masyarakat dalam pengelolaan Hutan Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan jumlah responden yang diwawancarai oleh peneliti adalah sebanyak 30 responden. Dari 30 responden yang diwawancarai memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik responden dapat diukur dari tingkat pendidikan, umur dan mata pencaharian.

### Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang yang tinggi berbanding lurus dengan pengetahuan dan pergaulannya sehingga dari sini jenis-jenis kebutuhan untuk mendukung aktifitasnya akan semakin kompleks dan beragam. Itulah sebabnya mengapa tingkat pendidikan berpengaruh pada tingkat kebutuhan seseorang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini mengenai tingkat pendidikan responden :

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden Masyarakat Desa Kajulangko

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SD	21	70
2	SMP	5	17
3	SMA	4	13
Jumlah		30	100

Dari tabel diatas kita dapat melihat persentase tingkat pendidikan yang diambil dari jumlah responden sebanyak 30 responden, peneliti mengelompokannya dalam tabel diatas dengan jumlah responden yang memiliki pendidikan SD berjumlah 21 meresponden atau 70%, SMP sebanyak 5 responden atau 17% dan SMA sebanyak 4 responden atau 13%. Dari persentase tingkat pendidikan yang responden

dapatkan dengan mengambil sampel dari 30 responden dapat disimpulkan di Desa Kajulangko masih banyak masyarakatnya yang mempunyai tingkat pendidikannya masih SD.

Tingkat pendidikan responden mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa responden yang ditunjuk langsung oleh peneliti termasuk anggota yang terlibat dalam kelompok Hutan Desa diantaranya anggota LPHD. Tingkat pendidikan yang masih minim atau rata-rata berpendidikan SD sebanyak 70 persen. Hal ini dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pengetahuan dalam sikap masyarakat dalam pengelolaan Hutan Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

### Umur

Usia adalah waktu sejak dilahirkan sampai dilaksanakannya penelitian yang dinyatakan dengan tahun. Usia > 20 tahun dinamakan remaja, dimana menurut piaget secara psikologi, masa remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa dan termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Pada masa remaja terjadi perubahan sikap dan perilaku, sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Usia 18-40 tahun dinamakan dewasa dini dimana kemampuan mental mencapai puncaknya dalam usia 20 tahun untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru seperti pada misalnya mengingat hal-hal yang dipelajari, penalaran analogis dan berfikir kreatif. Pada masa dewasa ini sering mencapai puncak prestasi. Usia > 40 tahun dinamakan usia madya dini dimana pada masa tersebut akhirnya ditandai dengan perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada masa ini seseorang tinggal mempertahankan prestasi yang telah dicapainya pada usia deawasa (Hurlock, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini data umur responden masyarakat Kajulangko :

Tabel 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jum. Responden	Persentase (%)
1	20-30	4	13 %
2	31-40	7	23 %

3	>41	19	64 %
Jumlah		30	100 %

Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, seperti pada tabel diatas umur responden yang di wawancarai oleh penulis memiliki tiga tingkatan umur. Kisaran umur 20-30 tahun sebanyak 4 responden atau 13%, kisaran umur responden antara 31-40 tahun sebanyak 7 responden atau 23% dan kisaran umur yang lebih dari 40 tahun sebanyak 19 responden atau 64%. Hal ini menunjukkan bahwa umur responden sangat mempengaruhi dalam pengelolaan Hutan Desa Kajulangko.

### Sikap Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Desa Kajulangko

Melalui pengembangan program Hutan Desa merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa disekitar hutan. Untuk mengatur pengelolaan hutan desa, Departemen Kehutanan telah mengeluarkan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa yang kemudian diperbaiki melalui peraturan menteri Kehutanan nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Desa Kajulangko adalah salah satu Desa yang telah mendapatkan surat keputusan LHK dari pusat mengenai hutan Desa. Setelah ditvtapkannya menjadi hutan desa belum diketahui bagaimana sikap masyarakat Desa Kajulangko terhadap keluarnya SK-PAKHD (Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa) akan sangat mempengaruhi dalam upaya pengelolaan Hutan Desa. Oleh karena itu diperlukan sikap yang positif dari masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar Hutan Desa yang nantinya diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan mengerti manfaat dari Hutan Desa sehingga keberadaan dan kelestarian Hutan Desa dapat terus terjaga.

### Hutan Desa Baik Untuk Masyarakat Kajulangko

Nilai skoring sikap masyarakat dalam memandang Hutan Desa baik untuk masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Nilai Skor Hutan Desa Baik Untuk Masyarakat Kajulangko

No	Pernyataan	Skor	Nilai Skor x		Persentase (%)
			Jum. Responden	Jum. Responden	
1	Sangat Tidak Setuju	1	1	1	3%
2	Tidak Setuju	2	2	4	7%
3	Ragu-Ragu	3	6	18	20%
4	Setuju	4	9	36	30%
5	Sangat Setuju	5	12	60	40%
Jumlah			30	119	100%

Keterangan: Rendah (30-53) ; Sedang (54-77) ; Cukup Tinggi (78-101) ; Tinggi (102-125) ; dan Sangat Tinggi (126-150)

Dari hasil penelitian di lapangan dapat dilihat pada tabel diatas sikap masyarakat dalam memandang bahwa hutan desa baik untuk masyarakat. Seperti yang terlihat pada tabel diatas jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 3%, jumlah responden yang menjawab tidak setuju 2 responden atau 7%, yang menjawab ragu-ragu sebanyak 6 responden atau 20%, yang menjawab dengan kategori 4 atau setuju sebanyak 9 responden atau 30% serta yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 responden atau 40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat dalam memandang hutan desa baik untuk masyarakat cenderung tinggi dengan jumlah nilai skor 119.

Masyarakat yang menjawab tidak setuju adalah masyarakat yang kecewa karena tidak dilibatkan dalam sosialisasi dan fasilitasi sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan manfaat dari hutan desa dan memang mereka memiliki pekerjaan yang bukan bersumber dari hutan dan masyarakat yang menjawab ragu-ragu adalah masyarakat yang tidak mengetahui sepenuhnya tujuan serta manfaat dari hutan desa, mereka menganggap kurang mendapatkan informasi yang lengkap mengenai hutan desa, selain itu mereka menilai hutan desa belum ada kepastian penghasilan pendapatan dari hutan desa. Masyarakat yang menjawab setuju dan sangat setuju adalah masyarakat yang menyadari akan pentingnya hutan desa sebagai tempat perlindungan satwa dan tumbuhan, tempat rekreasi (air terjun kajulangko), sebagai penghasil kayu dan non-kayu, tempat penyimpanan cadangan air dan mencegahnya banjir/erosi serta tempat untuk mencari penghasilan dan fungsi lainnya.

### Hutan Desa Baik Untuk Pemerintah Desa

Berikut adalah nilai skoring sikap masyarakat dalam menyikapi Hutan Desa baik untuk pemerintah Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

Tabel 6. Nilai Skor Sikap Masyarakat Dalam Menyikapi Hutan Desa Baik Untuk Pemerintah Desa Kajulangko

No	Pernyataan	Skor	Nilai Skor x		Persentase (%)
			Jum. Responden	Jum. Responden	
1	Sangat Tidak Setuju	1	15	15	50%
2	Tidak Setuju	2	5	10	17%
3	Ragu-Ragu	3	5	15	17%
4	Setuju	4	3	12	10.00%
5	Sangat Setuju	5	2	10	6%
Jumlah			30	62	100%

*Keterangan: Rendah (30-53) ; Sedang (54-77) ; Cukup Tinggi (78-101) ; Tinggi (102-125) ; dan Sangat Tinggi (126-150)*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sikap masyarakat dalam menyikapi hutan desa baik untuk pemerintah desa cenderung sedang dengan jumlah skor nilai 62. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 15 responden atau 50%, responden yang menjawab tidak setuju 5 responden Atau 17%, jumlah responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 5 responden atau 17%, jumlah responden yang menjawab dengan skor nilai 4 atau kategori setuju sebanyak 3 responden atau 10% serta jumlah responden yang menjawab dengan pernyataan sangat setuju sebanyak 2 responden atau 7%.

Kategori masyarakat yang menjawab sangat tidak setuju adalah masyarakat yang memiliki lahan pada hutan desa dan tidak sama sekali mendapatkan perhatian dari aparat desa baik dalam bentuk bantuan dana untuk melaksanakan program-program dari KPH Sivia Patuju maupun infrastruktur jalan yang dibangun masih sangat buruk. Kategori masyarakat yang menjawab ragu-ragu pada pernyataan bahwa hutan desa baik untuk pemerintah desa adalah masyarakat yang melihat dan menilai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan hutan desa masih sangat buruk akan tetapi mereka juga acuh tak acuh dalam pengelolaan hutan desa karena sebagian besar mereka adalah yang bermata pencaharian sebagai buruh bangunan. Kategori masyarakat

yang menjawab sangat setuju adalah masyarakat yang selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dikarenakan adanya keakraban yang dimiliki dengan anggota pemerintah desa.

### Hutan Desa Penting Untuk Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka didapatkan nilai skoring untuk sikap masyarakat dalam menyikapi hutan desa penting untuk kesejahteraan ekonomi Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

Tabel 7. Nilai Skor Hutan Desa Penting Untuk Kesejahteraan Ekonomi

No	Pernyataan	Skor	Nilai Skor x		Persentase (%)
			Jum. Responden	Jum. Responden	
1	Sangat Tidak Setuju	1	20	20	67%
2	Tidak Setuju	2	1	2	3%
3	Ragu-Ragu	3	4	12	13%
4	Setuju	4	2	8	7%
5	Sangat Setuju	5	3	15	10%
Jumlah			30	57	100%

*Keterangan: Rendah (30-53) ; Sedang (54-77) ; Cukup Tinggi (78-101) ; Tinggi (102-125) ; dan Sangat Tinggi (126-150)*

Berdasarkan hasil penelitian sikap masyarakat dalam menyikapi bahwa hutan desa penting untuk kesejahteraan ekonomi cenderung sedang dengan jumlah nilai skor 57. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 20 responden atau 67%, jumlah responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 3%, jumlah responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 4 responden atau 13%, jumlah responden yang menyatakan setuju sebanyak 2 responden atau 7% dan jumlah responden yang menyatakan sangat setuju dalam pernyataan bahwa hutan desa penting untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi sebanyak 3 responden atau 10%.

Kategori masyarakat yang menyatakan sangat tidak setuju adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani serta yang memanfaatkan lahan di hutan desa namun sama sekali tidak mempunyai penghasilan yang lebih dari hasil kebun. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa sebagian besar masyarakat petani cenderung menanam tanaman yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran tetapi dalam skala yang kecil, sehingga untuk

mempertahankan pendapatan yang menetap sangat sulit. Kategori masyarakat yang menyatakan ragu-ragu terhadap pernyataan bahwa hutan desa penting untuk kesejahteraan ekonomi adalah mereka yang tidak mempunyai lahan di hutan desa serta bermata pencaharian sebagai buru bangunan. Kategori masyarakat yang menyatakan sangat setuju adalah masyarakat yang mempunyai lahan serta ekonomi mereka berkecukupan, karena selain bermata pencaharian sebagai petani mereka juga mempunyai pekerjaan sampingan sehingga masyarakat dalam kategori ini memandang ekonomi mereka berkecukupan.

### Hutan Desa Penting Untuk Kelestarian Hutan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, telah didapatkan nilai skoring untuk sikap masyarakat dalam menyikapi bahwa hutan desa penting untuk kelestarian hutan Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut:

Tabel 8. Hutan Desa Penting Untuk Kelestarian Hutan

No	Pernyataan	Skor	Jum. Responden	Nilai Skor x Jum. Responden	Persentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0%
2	Tidak Setuju	2	1	2	3%
3	Ragu-Ragu	3	2	6	7%
4	Setuju	4	8	32	27%
5	Sangat Setuju	5	19	95	63%
Jumlah			30	135	100%

Keterangan: Rendah (30-53); Sedang (54-77); Cukup Tinggi (78-101); Tinggi (102-125); dan Sangat Tinggi (126-150)

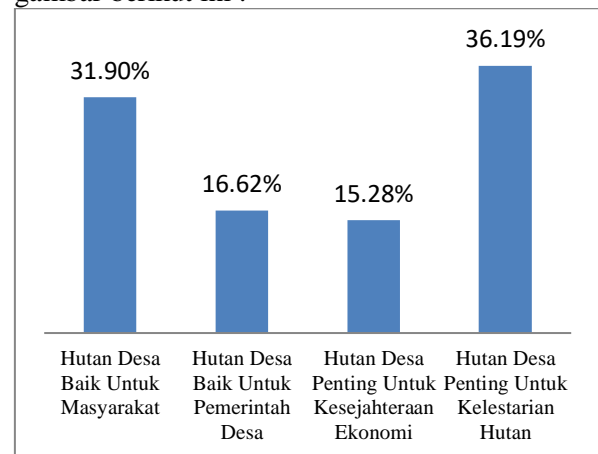
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sikap masyarakat dalam menyikapi hutan desa penting untuk kelestarian hutan cenderung sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat seperti pada tabel diatas. Jumlah responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 3%, jumlah responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 2 responden atau 7%, jumlah responden yang menjawab setuju atau dengan kategori 4 sebanyak 8 responden atau 27% serta jumlah responjden yang menjawab sangat setuju sebanyak 19 responden atu 63%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, kategori masyarakat yang menyatakan tidak setuju atau ragu-ragu terhadap pernyataan

bahwa hutan desa sangat penting untuk kelestarian hutan karena sebagian besar mereka yang tidak memiliki lahan di hutan desa serta jarak rumah mereka ke hutan desa juga cukup jauh. Kategori masyarakat yang menyatakan sangat setuju bahwa hutan desa penting untuk kelestarian hutan adalah mereka yang tinggal di area hutan desa sehingga dapat merasakan secara langsung hutan yang lestari misalnya sumber air yang masih terjaga dari pencemaran lingkungan serta hutan yang masih terjaga.

### Sikap Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Desa Kajulangko

Sikap masyarakat dalam pengelolaan Hutan Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Sikap Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa sikap masyarakat dalam pengelolaan hutan desa diantaranya adalah sikap masyarakat dalam menyikapi hutan desa baik untuk masyarakat, hutan desa baik untuk pemerintah desa, hutan desa penting untuk kesejahteraan ekonomi serta hutan desa penting untuk kelestarian hutan.

Hutan Desa baik untuk masyarakat karena dapat dilihat dari aktifitas sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan akan memanfaatkan lahan hutan sehingga mata pencaharian mereka sangat bergantung pada hutan. Pada penelitian ini yang menyebabkan sikap masyarakat cenderung positif terhadap penetapan areal kerja hutan desa karena tingkat pemahaman masyarakat yang tinggi tentang hutan desa sehingga mereka mengerti dan

memahami tentang manfaat hutan desa. Hal ini dibuktikan pada saat penelitian, masyarakat Desa Kajulangko sangat kooperatif dan bersedia diajak diskusi mengenai hutan desa. Menurut Sarwono (2002) bahwa ciri khas dari sikap adalah mempunyai obyek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, benda) juga mengandung penilaian setuju, tidak setuju, suka dan tidak suka. Perbedaan terletak pada proses selanjutnya dan penerapan konsep tentang sikap mengenai proses terjadinya sebagian besar pakar berpendapat bahwa sikap adalah sesuatu yang dipelajari (bukan bawaan). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi bahwa rata-rata masyarakat menilai hutan desa yang difasilitasi oleh pemerintah cukup baik dan sangat membantu dalam pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh salah satu warga yang menyatakan bahwa dengan adanya fasilitasi hutan desa sangat membantu dalam bentuk penyediaan lahan pertanian dan perkebunan.

Melalui pengembangan program hutan desa merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa disekitar hutan. Kurangnya sikap masyarakat dalam menyikapi hutan desa baik untuk pemerintah desa dikarenakan kurangnya perhatian lebih dari pemerintah desa mengenai pengelolaan hutan Desa Kajulangko. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) di Desa Kajulangko, bahwa sikap masyarakat dalam pengelolaan hutan desa sudah sangat antusias, akan tetapi dengan kurangnya perhatian dari pemerintah desa menyebabkan pengelolaan hutan Desa Kajulangko menjadi fakum. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa dapat dilihat dari tidak tersalurkannya anggaran dalam pengelolaan hutan desa, pembagian bantuan bibit tidak merata serta infrastruktur jalan yang masih sangat buruk. Dalam penelitian penulis di lapangan, bahwa aktivitas yang dilakukan mengenai pengelolaan hutan Desa Kajulangko sudah tidak berlangsung sehingga membuat masyarakat acuh terhadap pengembangan Hutan Desa Kajulangko kedepannya.

Menurut Dwiprabowo dkk, (2013) bahwa implementasi suatu kebijakan atau program dapat

berjalan efektif apabila dirumuskan berdasarkan masalah yang tepat dan pelaku serta sasaran memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankannya. Keberhasilan suatu kebijakan atau program sangat ditentukan oleh pelaksanaan peran masing-masing pemangku kepentingan. Untuk itu pemahaman fasilitator / pendampingan terhadap kelompok masyarakat sasaran mutlak diperlukan. Masyarakat pada umumnya tidak mampu apabila harus menyusun sendiri dokumen usulan dan rencana program. Untuk itu masyarakat memerlukan pendampingan maupun pelaksanaan kebijakan.

Tuntutan pemenuhan ekonomi menjadi motivasi masyarakat Desa Kajulangko untuk bertani atau berkebun di Hutan Negara tersebut. Ketidakmampuan masyarakat untuk membeli lahan di daerah asal domisili menjadi salah satu alasan membuka hutan negara tersebut. Pembangunan hutan desa dapat memberi kontribusi untuk pengembangan keamanan mata pencaharian bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan, melalui tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap kebijakan dan intitusi publik dalam penguasaan pemberdayaan alam. Keberadaan hutan desa sangat dirasakan bagi masyarakat yang bermukim disekitarnya, hal ini terungkap dipernyataan masyarakat saat wawancara bahwa, dengan adanya program hutan desa masyarakat memiliki keamanan dan kenyamanan dalam berusahatani. Hanya belum semua masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh hak kelolah dalam hutan desa karena hal tersebut dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, masyarakat Desa Kajulangko masih belum maksimal dalam memanfaatkan hutan desa yang ada dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola hasil pertanian dan perkebunan yang membantu nilai perekonomian sehingga menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya menanam tanaman yang bernilai unggul pada musimnya. Misalnya ketika harga tanaman nilam di pasaran meningkat, masyarakat Desa Kajulangko akan berlomba-lomba untuk menanam nilam di lahan perkebunan. Hal ini menyebabkan tidak adanya penetapan pendapatan ekonomi yang dihasilkan. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal ini disebabkan juga karena kurangnya pendampingan yang dilakukan di Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una serta kurangnya perhatian dari



pemerintah desa. Demi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kajulanko, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Pak Darwin bahwa sebelumnya telah diadakannya bantuan untuk peternakan lebah madu. Namun, karena tekanan ekonomi yang mendesak secara terus-menerus masyarakat Desa Kajulanko telah menjual hasil lebah madu beserta dengan induk dan box lebah madu yang diberikan langsung oleh KPH Sivia Patuju. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendampingan yang cukup di Desa Kajulanko dalam membimbing pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa lebah madu.

Kelestarian Hutan Desa Kajulanko masih sangat terjaga dari pencemaran yang dilakukan oleh aktivitas berlebihan manusia. Terbentuknya areal kerja hutan desa masyarakat dapat merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung, manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat yaitu manfaat ekologi misalnya suasana yang nyaman, sejuk dan ketersediaan air bersih, menciptakan wadah pengembangan sarana informasi dan penelitian tumbuhan dan satwa selain itu manfaat sosial juga dapat dirasakan oleh masyarakat beriring dengan rencana-rencana strategis yang mereka buat terhadap penetapan areal kerja hutan desa setelah diterbitkannya SK PAKHD (Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis telah menyusuri sebagian kecil area hutan desa. Penulis melihat adanya ekosistem yang masih terjaga dari pencemaran lingkungan sekitar. Masyarakat juga memanfaatkan air bersih yang berasal dari mata air terjun Desa Kajulanko. Oleh sebab itu, beberapa responden yang diwawancarai oleh penulis mereka menyatakan bahwa hutan desa sangat penting untuk kelestarian hutan. Pengelolaan hutan desa pada prinsipnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat disekitar hutan agar ikut memperoleh manfaat dari keberadaan hutan tanpa mengubah fungsi dan status kawasan hutan tersebut.

### KESIMPULAN

Sikap masyarakat dalam menyikapi bahwa hutan desa baik untuk masyarakat tergolong tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan respon masyarakat yang cenderung positif dalam memberikan pernyataan dan jawaban melalui hasil wawancara. Tingginya sikap masyarakat

dalam hal ini karena manfaat hutan desa yang secara langsung sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Kajulanko. Sikap masyarakat dalam menyikapi hutan desa baik untuk pemerintah desa masih tergolong rendah. Karena hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat yang sebagian besar cenderung negatif terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan hutan desa serta masih kurangnya perhatian yang diberikan oleh aparat desa dalam pengelolaan dan pengembangan hutan desa. Sikap masyarakat dalam menyikapi bahwa hutan desa sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi juga masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya pendampingan baik dari pemerintah desa maupun KPH Sivia Patuju dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga sebagian besar masyarakat masih kurang memahami tentang pemanfaatan hutan desa terutama dalam bidang ekonomi. Sikap masyarakat dalam menyikapi hutan desa sangat penting untuk kelestarian hutan sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan oleh penulis dengan melihat secara langsung ekosistem yang masih terjaga di hutan Desa Kajulanko.

Kurangnya perhatian dari pemerintah Desa Kajulanko dalam pengelolaan hutan desa menyebabkan hutan desa menjadi fakum. Sehingga dalam peningkatan ekonomi masyarakat juga menjadi sangat rendah. Hutan Desa Kajulanko menjadi fakum juga diakibatkan karena pemerintah desa yang masih acuh terhadap pengelolaan dan pengembangan hutan desa Kajulanko.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dwiprabowo, H., Mulyaningrum, dan Suwarno, E. (2013). Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan. *Prodi Rekaya Kehutanan*, 1–25.
- Fitriany, M. S., Farouk, H., dan Taqa, R. (2018). Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Kesehatan Lingkungan. *Jurnal Penelitian Sains*, 18(1), 41–46.
- Hamzah. (2015). Efektifitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau. *Sekolah Sarjana : Institut Pertanian Bogor*.
- Hurlock, E.B. 2002. *Psikologi Perkembangan*. 5th edition. Erlangga : Jakarta

- Lisma, A., Mardhiansyah, M., dan Yoza, D. (2017). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pentingnya Hutan di Lahan Gambut di Sekitar Kawasan Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. 4(1).
- Sahide, M. A. K. (2013). *Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng*.
- Santoso, M. (2018). *Pola penyebaran dan Asosiasi Jenis dominan di Kawasan Hutan Tintin Panjang, Hutan Desa Nanga Betung, Kalimantan Barat*.
- Sarwono, S. W. (2002). *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Balai Pustaka
- Suryadiuwarti, Soeaidy, M. S., dan S. (2015). Implementasi Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Program Magister Administrasi Publik*, 5(1), 195–203.
- Wahid, Abdullah. 2010. *Perencanaan Pembangunan Hutan Desa Sebagai Upaya Pelestarian Sumber Daya Hutan: Kasus di Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku*. Tesis. Yogyakarta: Program Ilmu Kehutanan Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjahmada